



**SAKALIMA**  
**PILAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENDIDIKAN**  
**VOL 3. NO. 1 (2026)**

ISSN: 3064-2361

## **Prinsip Perencanaan Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Kajian Literatur**

**Ice Rosina Sari**<sup>✉</sup>, **Agus Pahrudin**<sup>✉</sup>, dan **Sri Rahmi**<sup>✉</sup>

**To cite this article** Sari, I. R., Pahrudin, A., Rahmi, S., *Prinsip Perencanaan Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Kajian Literatur*. SAKALIMA: Pilar Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan, vol. 3, no. 1, pp. 118-133, 2026.  
<https://doi.org/10.70211/sakalima.v3i1.518>

**To link to this article:**



Published online: March. 30, 2026



Submit your article to this journal



View crossmark data



# Prinsip Perencanaan Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Kajian Literatur

Ice Rosina Sari\*, Agus Pahrudin, Sri Rahmi

Received: 02 Januari 2026

Revised: 29 Februari 2026

Accepted: 20 Maret 2026

Online: 30 Maret 2026

## Abstract

Curriculum planning is a strategic component of educational quality because it determines how institutional vision, graduate profiles, learning outcomes, content structure, pedagogical strategies, assessment systems, and quality assurance mechanisms are translated into meaningful learning experiences. This study aims to analyze the principles of curriculum planning in improving educational quality through an integrative literature review. The study synthesized peer-reviewed articles published between 2018 and 2025 that were relevant to curriculum planning, curriculum management, quality assurance, outcome-based education, educational quality culture, and continuous improvement. The literature was analyzed through data reduction, thematic coding, conceptual comparison, and synthesis of findings. The results show that quality-oriented curriculum planning is constructed through seven main principles: relevance, coherence, participation, flexibility, integration, learning outcome orientation, and continuous evaluation. Relevance ensures that the curriculum responds to learners' needs, societal demands, scientific development, labour market expectations, and institutional identity; coherence aligns vision, graduate profiles, learning outcomes, content, pedagogy, and assessment; participation strengthens accountability and stakeholder ownership; flexibility enables curriculum adaptation to technological, social, and policy changes; integration connects knowledge, skills, attitudes, values, and learning experiences; learning outcome orientation makes curriculum implementation measurable; and continuous evaluation supports evidence-based improvement. This study concludes that curriculum planning should not be treated merely as an administrative document, but as a strategic quality instrument that influences educational input, process, output, outcome, and institutional quality culture. The implication of this study is that educational institutions need to develop curriculum planning systems that are data-driven, participatory, coherent, adaptive, and continuously evaluated to ensure sustainable improvement in educational quality.

**Keywords:** Curriculum Planning; Educational Quality; Integrative Literature Review; Learning Outcomes; Quality Assurance.

## Publisher's Note:

WISE Pendidikan Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright:

©

2026 by the author(s).

License WISE Pendidikan Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license.

[\(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



## PENDAHULUAN

Perencanaan kurikulum merupakan fondasi strategis dalam peningkatan mutu pendidikan karena menentukan bagaimana visi kelembagaan, profil lulusan, capaian pembelajaran, struktur materi, pendekatan pedagogis, sistem asesmen, dan mekanisme penjaminan mutu diterjemahkan ke dalam pengalaman belajar yang koheren. Dalam pendidikan kontemporer, kurikulum tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai daftar mata pelajaran atau dokumen administratif, melainkan sebagai rancangan akademik, manajerial, dan evaluatif yang menghubungkan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, identitas kelembagaan, serta standar mutu pendidikan yang terukur [1], [2], [3], [4]. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum berkontribusi terhadap mutu pendidikan apabila disusun melalui analisis kebutuhan yang sistematis, keselarasan tujuan kelembagaan, partisipasi pemangku kepentingan, kesiapan pendidik, pemetaan capaian pembelajaran, serta evaluasi berkelanjutan [5], [6], [7], [8]. Argumen ini penting karena mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas keputusan kurikuler yang dibuat sebelum proses pembelajaran berlangsung; perencanaan kurikulum yang lemah dapat menimbulkan fragmentasi tujuan pembelajaran, ketidaksesuaian materi, inkonsistensi strategi pembelajaran, lemahnya asesmen, dan rendahnya relevansi lulusan dengan kebutuhan masyarakat [4], [9], [10]. Dalam konteks pendidikan Islam, relevansi perencanaan kurikulum semakin kuat karena kurikulum dituntut tidak hanya memenuhi standar akademik nasional, tetapi juga mengintegrasikan nilai kelembagaan, nilai keislaman, budaya pesantren atau madrasah, kebutuhan peserta didik, dan tantangan pendidikan modern [5], [7], [11].

Hubungan antara perencanaan kurikulum dan mutu pendidikan menjadi semakin signifikan ketika ditempatkan dalam kerangka penjaminan mutu dan akuntabilitas kelembagaan. Literatur penjaminan mutu menegaskan bahwa lembaga pendidikan memerlukan standar yang jelas, monitoring berbasis bukti, evaluasi sistematis, akuntabilitas publik, dan mekanisme perbaikan berkelanjutan untuk memastikan proses pendidikan berjalan relevan, efektif, dan berorientasi hasil [12], [13], [14]. Namun, sistem penjaminan mutu tidak dapat berjalan secara optimal apabila kurikulum sebagai instrumen inti akademik tidak direncanakan secara koheren, sebab melalui kurikulum standar mutu diimplementasikan, capaian pembelajaran diwujudkan, dan kualitas kelembagaan dibuktikan [1], [2], [3]. Kajian tentang budaya mutu juga menunjukkan bahwa mutu pendidikan tidak cukup dijaga melalui prosedur formal, tetapi harus didukung oleh nilai bersama, komitmen kepemimpinan, komunikasi organisasi, partisipasi warga lembaga, pembelajaran organisasi, dan refleksi berkelanjutan [3], [15], [16]. Oleh karena itu, perencanaan kurikulum perlu ditempatkan sebagai bagian dari budaya mutu, bukan sekadar rutinitas administratif tahunan. Dalam perspektif ini, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai proses strategis yang menghubungkan standar pendidikan, tata kelola kelembagaan, profesionalisme pendidik, pengalaman belajar peserta didik, dan siklus peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Salah satu prinsip utama dalam perencanaan kurikulum berbasis mutu adalah relevansi. Kurikulum dapat dikatakan relevan apabila mampu merespons kebutuhan perkembangan peserta didik, perubahan sosial lokal dan global, ekspektasi dunia kerja, transformasi teknologi, perkembangan disiplin ilmu, serta nilai-nilai kelembagaan [2], [4], [17]. Dalam lembaga pendidikan Islam, relevansi juga mencakup kemampuan kurikulum untuk menghubungkan standar akademik nasional dengan nilai Islam, pembentukan karakter, budaya pesantren atau

madrasah, dan kompetensi abad ke-21 [5], [11], [18]. Penelitian tentang kurikulum pendidikan Islam berbasis riset menunjukkan bahwa relevansi kurikulum dapat diperkuat melalui asesmen kebutuhan, kolaborasi pemangku kepentingan, integrasi ilmu agama dan ilmu umum, asesmen autentik, pelatihan pendidik, serta adaptasi kurikulum terhadap tantangan kontemporer [10], [18], [19]. Demikian pula, kajian tentang manajemen kurikulum di pesantren dan madrasah menunjukkan bahwa peningkatan mutu memerlukan perencanaan, pelaksanaan, supervisi pembelajaran, dukungan pendidik, pengendalian kurikulum, dan evaluasi periodik [6], [7], [20]. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa relevansi bukan prinsip yang bersifat statis, melainkan harus terus direkonstruksi melalui analisis konteks, umpan balik pemangku kepentingan, dan perbaikan kurikulum berbasis bukti [14], [17], [21].

Prinsip penting lainnya adalah koherensi, yaitu keselarasan antara visi kelembagaan, profil lulusan, capaian pembelajaran, isi kurikulum, strategi pembelajaran, sumber belajar, metode asesmen, dan prosedur evaluasi. Koherensi menjadi inti mutu pendidikan karena kurikulum dapat terlihat lengkap secara administratif, tetapi lemah secara akademik apabila tujuan, materi, strategi pembelajaran, dan asesmen tidak saling terhubung. Studi tentang kurikulum berbasis capaian pembelajaran menegaskan bahwa capaian pembelajaran perlu menjadi dasar dalam penyusunan struktur kurikulum, pemilihan metode pembelajaran, desain asesmen, dan evaluasi kompetensi lulusan [14], [16], [22]. Dalam konteks pendidikan Islam, koherensi juga berarti bahwa kurikulum harus mengintegrasikan dimensi intelektual, moral, spiritual, sosial, dan praktis dalam proses pembelajaran. Prinsip ini berkaitan erat dengan integrasi kurikulum, sebab pemisahan antara nilai, pengetahuan, keterampilan, dan asesmen dapat melahirkan kesenjangan antara idealitas kelembagaan dan realitas pembelajaran. Oleh karena itu, perencanaan kurikulum perlu menghasilkan peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran yang terukur, urutan materi yang relevan, model pedagogis yang tepat, instrumen asesmen yang valid, dan mekanisme peninjauan kurikulum yang terdokumentasi.

Partisipasi dan fleksibilitas juga merupakan prinsip penting dalam perencanaan kurikulum untuk peningkatan mutu pendidikan. Partisipasi pemangku kepentingan memastikan bahwa keputusan kurikuler tidak hanya ditentukan oleh elite kelembagaan, tetapi juga diinformasikan oleh pendidik, peserta didik, orang tua, alumni, pengguna lulusan, masyarakat, pembuat kebijakan, dan unit penjaminan mutu. Perencanaan kurikulum yang partisipatif dapat memperkuat akuntabilitas kelembagaan karena memungkinkan lembaga pendidikan mengidentifikasi kebutuhan belajar yang nyata, mengevaluasi relevansi kurikulum, dan mengantisipasi hambatan implementasi. Sementara itu, fleksibilitas memungkinkan kurikulum beradaptasi terhadap perubahan teknologi, keragaman kebutuhan peserta didik, kearifan lokal, perubahan kebijakan, dan situasi sosial yang tidak selalu dapat diprediksi. Studi tentang inovasi digital, transformasi kurikulum, dan modernisasi pesantren menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum yang fleksibel dapat mendukung pembelajaran digital, pengembangan profesional pendidik, efisiensi administrasi, keterlibatan peserta didik, dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Dengan demikian, perencanaan kurikulum yang partisipatif dan fleksibel dapat memperkuat mutu pendidikan karena menjadikan kurikulum lebih responsif, inklusif, adaptif, dan bermakna secara kontekstual.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan manajemen kurikulum, integrasi kurikulum, penjaminan mutu, dan mutu pendidikan. Kajian tentang manajemen kurikulum dalam pendidikan Islam telah membahas

desain kurikulum, implementasi, supervisi, evaluasi, kompetensi profesional pendidik, dan mutu lulusan. Kajian tentang penjaminan mutu pendidikan telah menelaah sistem penjaminan mutu internal, kesiapan akreditasi, tantangan tata kelola, budaya mutu, dan perbaikan berkelanjutan. Sementara itu, kajian tentang relevansi dan inovasi kurikulum telah membahas kurikulum berbasis riset, inovasi digital, modernisasi pesantren, kearifan lokal, nilai Islam, dan keterampilan abad ke-21. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih relatif terfragmentasi. Studi kurikulum lebih banyak berfokus pada praktik implementasi, sedangkan studi penjaminan mutu cenderung menekankan standar, akreditasi, dan monitoring. Di sisi lain, studi inovasi kurikulum sering membahas teknologi, nilai, atau adaptasi kontekstual tanpa menyintesis prinsip-prinsip inti perencanaan kurikulum sebagai kerangka strategis peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip perencanaan kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui kajian literatur integratif. Secara khusus, penelitian ini berupaya menyintesis studi-studi peer-reviewed terbaru yang terbit pada periode 2018–2025, mengidentifikasi prinsip-prinsip dominan dalam perencanaan kurikulum berbasis mutu, serta menawarkan kerangka konseptual yang menghubungkan relevansi, koherensi, partisipasi, fleksibilitas, integrasi, orientasi capaian pembelajaran, dan evaluasi berkelanjutan dengan peningkatan mutu pendidikan.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur integratif (*integrative literature review*) untuk menganalisis prinsip-prinsip perencanaan kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk menyintesis temuan-temuan konseptual dan empiris dari berbagai artikel ilmiah yang membahas perencanaan kurikulum, manajemen kurikulum, penjaminan mutu, budaya mutu, capaian pembelajaran, dan peningkatan mutu pendidikan [23], [24], [25], [26]. Kajian literatur integratif memungkinkan peneliti menggabungkan berbagai perspektif teoretis, hasil penelitian, dan konteks kelembagaan sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip-prinsip kurikulum yang berkontribusi terhadap mutu pendidikan. Dalam penelitian ini, perencanaan kurikulum diposisikan sebagai proses strategis yang menghubungkan visi pendidikan, kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, profil lulusan, capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, asesmen, dan evaluasi berkelanjutan [24], [27], [28].

Sumber data dalam penelitian ini berupa artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan pada rentang tahun 2018-2025 dan relevan dengan fokus kajian. Literatur ditelusuri melalui beberapa basis pencarian akademik, seperti Google Scholar, Garuda, SINTA, Crossref, DOAJ, dan laman resmi jurnal penerbit. Kata kunci yang digunakan dalam proses penelusuran meliputi “perencanaan kurikulum”, “manajemen kurikulum”, “pengembangan kurikulum”, “mutu pendidikan”, “penjaminan mutu pendidikan”, “budaya mutu”, “curriculum planning”, “curriculum management”, “curriculum development”, “educational quality”, “quality assurance”, “outcome-based education”, dan “curriculum evaluation”. Penggunaan kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dilakukan untuk memperluas cakupan literatur serta

menangkap artikel yang relevan dari jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup artikel yang diterbitkan pada jurnal peer-reviewed, memiliki DOI atau metadata penerbitan yang dapat diverifikasi, terbit pada jurnal internasional terindeks Scopus/WoS atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 1, 2, 3, atau 4, serta memiliki relevansi konseptual dan metodologis dengan perencanaan kurikulum dan mutu pendidikan. Artikel yang dipilih harus membahas sekurang-kurangnya salah satu tema utama, yaitu desain kurikulum, manajemen kurikulum, implementasi kurikulum, evaluasi kurikulum, penjaminan mutu, capaian pembelajaran, kompetensi lulusan, profesionalisme pendidik, atau budaya mutu pendidikan. Adapun kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak memiliki DOI atau metadata yang jelas, artikel populer nonakademik, opini tanpa metode ilmiah, artikel duplikat, serta artikel yang hanya membahas kurikulum secara umum tanpa kaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan.

Proses seleksi literatur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah identifikasi awal melalui penelusuran artikel berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. Tahap kedua adalah penyaringan berdasarkan judul, abstrak, kata kunci, tahun terbit, status jurnal, dan ketersediaan DOI. Tahap ketiga adalah pembacaan teks lengkap untuk menilai kesesuaian artikel dengan fokus penelitian. Tahap keempat adalah pemilihan artikel inti yang paling relevan untuk dianalisis secara mendalam. Dalam proses ini, artikel yang memiliki kontribusi langsung terhadap prinsip perencanaan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan diprioritaskan, terutama artikel yang menjelaskan hubungan antara kurikulum, capaian pembelajaran, partisipasi pemangku kepentingan, fleksibilitas, integrasi nilai, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.

Analisis data dilakukan melalui empat langkah utama, yaitu reduksi literatur, pengodean tematik, komparasi konseptual, dan sintesis temuan. Reduksi literatur dilakukan dengan menyeleksi informasi penting dari setiap artikel, seperti tujuan penelitian, metode, fokus kajian, temuan utama, dan kontribusi terhadap tema perencanaan kurikulum. Pengodean tematik dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam beberapa tema utama, yaitu relevansi kurikulum, koherensi kurikulum, partisipasi pemangku kepentingan, fleksibilitas, integrasi pengetahuan dan nilai, orientasi capaian pembelajaran, serta evaluasi berkelanjutan. Komparasi konseptual dilakukan untuk membandingkan kesamaan, perbedaan, dan kecenderungan temuan antarartikel. Selanjutnya, sintesis temuan dilakukan untuk merumuskan kerangka konseptual prinsip perencanaan kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas kajian, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, pengecekan DOI, pembacaan silang antarartikel, dan penilaian relevansi konseptual. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan artikel dari jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi. Pengecekan DOI dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rujukan yang digunakan dapat ditelusuri secara akademik. Pembacaan silang dilakukan untuk menghindari penarikan kesimpulan yang bersifat sepihak atau terlalu bergantung pada satu sumber tertentu. Sementara itu, penilaian relevansi konseptual dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang dianalisis benar-benar berkontribusi terhadap pembentukan argumentasi tentang prinsip perencanaan kurikulum dan mutu pendidikan. Dengan prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan sintesis yang sistematis, dapat dipertanggungjawabkan,

dan relevan bagi pengembangan kajian manajemen kurikulum serta peningkatan mutu pendidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### *Pemetaan Literatur tentang Perencanaan Kurikulum dan Mutu Pendidikan*

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian tentang perencanaan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan berkembang dalam beberapa arah utama. Pertama, terdapat kelompok kajian yang menempatkan kurikulum sebagai instrumen strategis dalam menghubungkan visi kelembagaan, profil lulusan, capaian pembelajaran, struktur materi, strategi pembelajaran, dan asesmen. Kedua, terdapat kajian yang menekankan hubungan antara kurikulum dan sistem penjaminan mutu, terutama melalui monitoring, evaluasi, akreditasi, pengukuran capaian pembelajaran, dan perbaikan berkelanjutan. Ketiga, terdapat kajian yang membahas kurikulum dalam konteks transformasi pendidikan, baik melalui integrasi nilai, digitalisasi, budaya kelembagaan, maupun kebutuhan abad ke-21. Keempat, terdapat kajian yang menyoroti pentingnya kompetensi pendidik, kepemimpinan, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan implementasi kurikulum. Pemetaan ini memperlihatkan bahwa mutu pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan dokumen kurikulum, tetapi oleh sejauh mana kurikulum dirancang secara relevan, koheren, partisipatif, adaptif, dan dievaluasi secara berkelanjutan.

**Tabel 1. Pemetaan Kluster Literatur Perencanaan Kurikulum dan Mutu Pendidikan**

Kluster Literatur	Fokus Utama Kajian	Kontribusi terhadap Penelitian	Rujukan Kunci
Desain dan manajemen kurikulum	Perumusan profil lulusan, struktur kurikulum, organisasi mata pelajaran/mata kuliah, dan strategi implementasi	Menegaskan bahwa kurikulum harus dirancang secara sistematis berdasarkan tujuan kelembagaan dan kebutuhan peserta didik	Rojji et al. [5]; Lubis [4]; Syarifah & Buerahen [7]
Kurikulum dan penjaminan mutu	SPMI, akreditasi, monitoring, evaluasi, audit kurikulum, dan perbaikan berkelanjutan	Menunjukkan bahwa kurikulum merupakan instrumen inti dalam sistem mutu lembaga pendidikan	Fadhli [12]; Tarigan & Zahara [13]; Wulandari et al. [14]
Kurikulum berbasis capaian pembelajaran	Profil lulusan, capaian pembelajaran, asesmen, dan keselarasan pembelajaran	Memperkuat prinsip koherensi antara tujuan, materi, strategi, dan evaluasi	Lubis [4]; Asiyai [2]; Yusuf [16]
Kurikulum adaptif dan kontekstual	Digitalisasi, kebutuhan masyarakat, nilai kelembagaan, budaya lokal, dan keterampilan abad ke-21	Menegaskan pentingnya fleksibilitas dan relevansi kurikulum terhadap perubahan zaman	Rada et al. [17]; Tuala et al. [8]; Fahrudin & Malik [18]
Kurikulum integratif dalam pendidikan Islam	Integrasi ilmu, nilai Islam, budaya pesantren, karakter, dan kompetensi modern	Menunjukkan bahwa mutu pendidikan Islam memerlukan kurikulum yang menyatukan dimensi akademik, moral, spiritual, dan sosial	Nuraeni & Irawan [6]; Zakiya et al. [11]; Muzakki et al. [19]

Tabel 1 menunjukkan bahwa kajian tentang perencanaan kurikulum dan mutu pendidikan tidak berdiri pada satu pendekatan tunggal. Literatur yang dianalisis memperlihatkan adanya hubungan antara dimensi akademik, manajerial, evaluatif, dan kontekstual dalam perencanaan kurikulum. Dengan demikian, perencanaan kurikulum yang bermutu tidak cukup hanya memenuhi standar formal, tetapi harus mampu menjadi alat

strategis untuk mengarahkan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi, dan memastikan keberlanjutan peningkatan mutu lembaga pendidikan.

### **Prinsip-Prinsip Utama Perencanaan Kurikulum Berbasis Mutu**

Hasil sintesis menunjukkan bahwa terdapat tujuh prinsip utama yang paling dominan dalam perencanaan kurikulum berbasis mutu, yaitu relevansi, koherensi, partisipasi, fleksibilitas, integrasi, orientasi capaian pembelajaran, dan evaluasi berkelanjutan. Prinsip relevansi berkaitan dengan kesesuaian kurikulum terhadap kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan identitas kelembagaan. Prinsip koherensi menunjukkan pentingnya keselarasan antara tujuan pendidikan, capaian pembelajaran, materi, strategi pembelajaran, dan asesmen. Prinsip partisipasi menegaskan bahwa perencanaan kurikulum perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar kurikulum tidak bersifat elitis dan tertutup. Prinsip fleksibilitas memperlihatkan kemampuan kurikulum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi, kebijakan, dan kebutuhan peserta didik. Prinsip integrasi menunjukkan pentingnya penyatuan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan pengalaman belajar. Prinsip orientasi capaian pembelajaran menegaskan bahwa kurikulum harus dirancang berdasarkan kompetensi yang jelas dan terukur. Sementara itu, prinsip evaluasi berkelanjutan menempatkan kurikulum sebagai sistem yang perlu ditinjau, diperbaiki, dan dikembangkan secara periodik.

**Tabel 2.** Prinsip Perencanaan Kurikulum dan Makna Mutu Pendidikan

<b>Prinsip Perencanaan Kurikulum</b>	<b>Makna Utama</b>	<b>Bentuk Implementasi</b>	<b>Kontribusi terhadap Mutu Pendidikan</b>
Relevansi	Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, perkembangan ilmu, dunia kerja, dan nilai kelembagaan	Analisis kebutuhan, tracer study, kajian konteks, penyesuaian materi, dan pelibatan pengguna lulusan	Meningkatkan kebermaknaan pembelajaran dan daya guna lulusan
Koherensi	Keselarasan antara visi, profil lulusan, capaian pembelajaran, materi, strategi, dan asesmen	Peta kurikulum, matriks CPL/CPMK, kesesuaian asesmen, dan urutan materi yang logis	Menjamin arah pembelajaran yang konsisten dan terukur
Partisipasi	Pelibatan pihak internal dan eksternal dalam perencanaan kurikulum	Workshop kurikulum, forum pemangku kepentingan, masukan alumni, pengguna lulusan, guru/dosen, dan peserta didik	Memperkuat akuntabilitas dan penerimaan kurikulum
Fleksibilitas	Kemampuan kurikulum beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, kebijakan, dan kebutuhan peserta didik	Pembelajaran diferensiatif, integrasi teknologi, proyek, pilihan mata kuliah/topik, dan inovasi pembelajaran	Mendorong responsivitas dan inovasi pendidikan
Integrasi	Penyatuan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan pengalaman belajar	Integrasi nilai, pembelajaran lintas disiplin, proyek kontekstual, dan pembentukan karakter	Membentuk kompetensi peserta didik secara holistik
Orientasi capaian pembelajaran	Perencanaan kurikulum berdasarkan hasil belajar yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi	Rumusan CPL, CPMK, indikator, rubrik asesmen, dan evaluasi ketercapaian pembelajaran	Memperkuat akuntabilitas akademik dan kualitas lulusan
Evaluasi berkelanjutan	Peninjauan dan perbaikan kurikulum secara periodik berbasis data	Monitoring, evaluasi kurikulum, audit akademik,	Menjamin peningkatan mutu

Prinsip Perencanaan Kurikulum	Makna Utama	Bentuk Implementasi	Kontribusi terhadap Mutu Pendidikan
		survei kepuasan, dan tindak lanjut	secara sistematis dan berkelanjutan

Tabel 2 memperlihatkan bahwa setiap prinsip memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan. Relevansi memastikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan nyata; koherensi menjamin hubungan antarkomponen kurikulum; partisipasi memperkuat legitimasi dan akuntabilitas; fleksibilitas memungkinkan kurikulum responsif terhadap perubahan; integrasi membentuk keutuhan kompetensi; orientasi capaian pembelajaran membuat kurikulum lebih terukur; dan evaluasi berkelanjutan memastikan adanya mekanisme perbaikan. Sintesis ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas perencanaan kurikulum sebagai proses strategis dan berkelanjutan.

### *Hubungan Perencanaan Kurikulum dengan Dimensi Mutu Pendidikan*

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip perencanaan kurikulum memiliki hubungan langsung dengan beberapa dimensi mutu pendidikan. Dimensi pertama adalah mutu input, yang berkaitan dengan kesiapan peserta didik, pendidik, sumber belajar, sarana, kebijakan, dan struktur kurikulum. Dimensi kedua adalah mutu proses, yang mencakup kualitas pembelajaran, strategi pedagogis, interaksi akademik, supervisi, asesmen, dan layanan pendidikan. Dimensi ketiga adalah mutu output, yang terlihat dari capaian pembelajaran, kompetensi lulusan, karakter, prestasi, dan kesiapan peserta didik melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Dimensi keempat adalah mutu outcome, yang berkaitan dengan kebermanfaatan lulusan, kepuasan pengguna, relevansi sosial, dan kontribusi pendidikan terhadap masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum tidak hanya berdampak pada dokumen akademik, tetapi juga pada keseluruhan sistem mutu pendidikan.

**Tabel 3.** Kontribusi Prinsip Perencanaan Kurikulum terhadap Dimensi Mutu Pendidikan

Dimensi Mutu Pendidikan	Kontribusi Perencanaan Kurikulum	Prinsip yang Paling Berperan	Indikator Mutu yang Dapat Diamati
Mutu input	Menentukan kesiapan struktur kurikulum, sumber belajar, kompetensi pendidik, dan kebutuhan peserta didik	Relevansi, partisipasi, integrasi	Kurikulum berbasis kebutuhan, kesiapan pendidik, ketersediaan sumber belajar, dan dukungan kelembagaan
Mutu proses	Mengarahkan pelaksanaan pembelajaran, strategi pedagogis, asesmen, supervisi, dan pengalaman belajar	Koherensi, fleksibilitas, orientasi capaian pembelajaran	Pembelajaran aktif, asesmen sesuai capaian, supervisi berjalan, dan strategi pembelajaran bervariasi
Mutu output	Menghasilkan capaian pembelajaran, kompetensi, karakter, dan prestasi peserta didik	Orientasi capaian pembelajaran, integrasi, koherensi	Ketercapaian CPL/CPMK, prestasi akademik, kompetensi lulusan, dan perkembangan karakter
Mutu outcome	Menjamin relevansi lulusan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan pengembangan diri	Relevansi, evaluasi berkelanjutan, partisipasi	Kepuasan pengguna lulusan, tracer study, kontribusi sosial, dan relevansi kompetensi lulusan
Mutu kelembagaan	Memperkuat budaya mutu, akuntabilitas akademik, dan perbaikan berkelanjutan	Evaluasi berkelanjutan, partisipasi, koherensi	Audit kurikulum, tindak lanjut evaluasi, dokumentasi mutu, dan perbaikan kurikulum periodik

Tabel 3 menegaskan bahwa perencanaan kurikulum berkontribusi terhadap mutu pendidikan secara berlapis. Pada level input, kurikulum membantu lembaga mengidentifikasi kebutuhan dan kesiapan sumber daya. Pada level proses, kurikulum mengarahkan pengalaman belajar agar berjalan konsisten dengan tujuan pendidikan. Pada level output, kurikulum menjadi dasar pengukuran kompetensi dan capaian pembelajaran. Pada level outcome, kurikulum menentukan relevansi lulusan dengan kebutuhan sosial dan profesional. Sementara itu, pada level kelembagaan, kurikulum menjadi bagian dari budaya mutu karena menuntut adanya evaluasi, dokumentasi, dan perbaikan secara berkelanjutan.

### **Kerangka Konseptual Perencanaan Kurikulum Berbasis Mutu**

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini menghasilkan kerangka konseptual perencanaan kurikulum berbasis mutu. Kerangka ini menempatkan perencanaan kurikulum sebagai proses strategis yang dimulai dari analisis kebutuhan, perumusan tujuan, penyusunan capaian pembelajaran, pengorganisasian isi, pemilihan strategi pembelajaran, pengembangan asesmen, pelaksanaan kurikulum, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan. Seluruh tahapan tersebut harus dilandasi oleh tujuh prinsip utama yang telah diidentifikasi, yaitu relevansi, koherensi, partisipasi, fleksibilitas, integrasi, orientasi capaian pembelajaran, dan evaluasi berkelanjutan.

**Tabel 4.** Kerangka Konseptual Perencanaan Kurikulum Berbasis Mutu

<b>Tahap Perencanaan Kurikulum</b>	<b>Fokus Kegiatan</b>	<b>Prinsip yang Terlibat</b>	<b>Output yang Diharapkan</b>
Analisis kebutuhan	Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, masyarakat, dunia kerja, kebijakan, dan perkembangan ilmu	Relevansi, partisipasi	Data kebutuhan kurikulum dan profil konteks lembaga
Perumusan tujuan dan profil lulusan	Menentukan arah kurikulum, karakter lulusan, dan kompetensi utama	Koherensi, orientasi capaian pembelajaran	Profil lulusan dan tujuan kurikulum yang jelas
Penyusunan capaian pembelajaran	Merumuskan capaian pembelajaran yang terukur dan sesuai standar	Orientasi capaian pembelajaran, koherensi	Rumusan capaian pembelajaran dan indikator ketercapaian
Pengorganisasian isi kurikulum	Menyusun bahan kajian, struktur materi, dan urutan pembelajaran	Koherensi, integrasi	Struktur kurikulum dan peta materi yang sistematis
Pemilihan strategi pembelajaran	Menentukan pendekatan, metode, media, dan pengalaman belajar	Fleksibilitas, integrasi	Rencana pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan adaptif
Pengembangan asesmen	Menyusun instrumen evaluasi yang sesuai dengan capaian pembelajaran	Koherensi, orientasi capaian pembelajaran	Rubrik, instrumen asesmen, dan mekanisme penilaian
Evaluasi dan tindak lanjut	Menilai keterlaksanaan kurikulum dan melakukan perbaikan	Evaluasi berkelanjutan, partisipasi	Rekomendasi revisi kurikulum dan perbaikan mutu

Tabel 4 memperlihatkan bahwa perencanaan kurikulum berbasis mutu bukan proses linear yang berhenti pada penyusunan dokumen, melainkan siklus strategis yang terus bergerak dari analisis kebutuhan hingga evaluasi dan tindak lanjut. Kerangka ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan dapat ditingkatkan apabila setiap tahap perencanaan kurikulum didasarkan pada prinsip yang jelas dan menghasilkan output yang dapat ditelusuri. Dengan demikian, kurikulum berfungsi bukan hanya sebagai pedoman pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian, pengukuran, dan peningkatan mutu pendidikan.

### Sintesis Temuan Utama

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum memiliki peran sentral dalam peningkatan mutu pendidikan karena menjadi titik awal bagi pengembangan pembelajaran yang relevan, terarah, terukur, dan berkelanjutan. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa lembaga pendidikan yang menempatkan kurikulum sebagai instrumen strategis cenderung memiliki arah pembelajaran yang lebih jelas, standar kompetensi yang lebih terukur, proses evaluasi yang lebih sistematis, serta peluang peningkatan mutu yang lebih besar. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kurikulum tidak dapat diposisikan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi harus dipahami sebagai sistem akademik yang mengintegrasikan kebutuhan, tujuan, proses, asesmen, dan evaluasi.

Tabel 5. Ringkasan Temuan Utama Penelitian

Temuan Utama	Penjelasan	Implikasi terhadap Mutu Pendidikan
Perencanaan kurikulum merupakan proses strategis	Kurikulum menghubungkan visi lembaga, kebutuhan peserta didik, capaian pembelajaran, dan evaluasi	Lembaga perlu menjadikan kurikulum sebagai pusat pengembangan mutu
Mutu kurikulum ditentukan oleh tujuh prinsip utama	Relevansi, koherensi, partisipasi, fleksibilitas, integrasi, orientasi capaian pembelajaran, dan evaluasi berkelanjutan	Penyusunan kurikulum harus berbasis prinsip, bukan sekadar format dokumen
Kurikulum berkontribusi pada mutu input, proses, output, outcome, dan kelembagaan	Kurikulum memengaruhi kesiapan sumber daya, proses belajar, kompetensi lulusan, dan budaya mutu	Evaluasi mutu perlu memasukkan indikator kurikulum secara komprehensif
Partisipasi pemangku kepentingan memperkuat akuntabilitas kurikulum	Kurikulum yang disusun secara kolaboratif lebih sesuai dengan kebutuhan nyata	Lembaga perlu melibatkan guru/dosen, peserta didik, alumni, pengguna lulusan, dan masyarakat
Evaluasi berkelanjutan menjadi kunci perbaikan kurikulum	Kurikulum harus ditinjau secara periodik berdasarkan data dan umpan balik	Perbaikan mutu harus berbasis bukti dan tindak lanjut yang terdokumentasi

Berdasarkan ringkasan tersebut, hasil penelitian ini menegaskan bahwa prinsip perencanaan kurikulum dapat menjadi kerangka operasional dalam meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu tidak hanya bergantung pada kebijakan, akreditasi, atau kelengkapan perangkat pembelajaran, tetapi juga pada kemampuan lembaga pendidikan merancang kurikulum secara sistematis, relevan, koheren, partisipatif, fleksibel, integratif, berorientasi capaian pembelajaran, dan dievaluasi secara berkelanjutan.

### Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa perencanaan kurikulum memiliki kedudukan strategis dalam peningkatan mutu pendidikan karena berfungsi sebagai penghubung antara visi kelembagaan, kebutuhan peserta didik, capaian pembelajaran, strategi pedagogis, asesmen, serta evaluasi berkelanjutan. Dalam perspektif ini, kurikulum tidak dapat dipahami hanya sebagai dokumen administratif atau perangkat pembelajaran, tetapi sebagai instrumen akademik dan manajerial yang menentukan arah mutu input, proses, output, outcome, dan budaya kelembagaan. Literatur tentang desain kurikulum, manajemen kurikulum, dan penjaminan mutu menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu bahwa mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kurikulum dirancang secara sistematis, kontekstual, terukur, dan dievaluasi secara berkelanjutan [1], [2], [3], [5]. Dengan demikian, kontribusi

utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa perencanaan kurikulum merupakan titik awal pengendalian mutu pendidikan, bukan sekadar tahap teknis sebelum pelaksanaan pembelajaran.

Prinsip relevansi yang ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa kurikulum bermutu harus mampu merespons kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, tuntutan masyarakat, dunia kerja, nilai kelembagaan, serta konteks lokal pendidikan. Temuan ini memperluas diskursus manajemen kurikulum yang selama ini banyak menekankan kesesuaian kurikulum dengan standar akademik, profil lulusan, struktur mata kuliah, dan capaian pembelajaran [4]. Relevansi dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai kesesuaian statis terhadap regulasi atau dokumen standar, tetapi sebagai proses dinamis yang harus terus dikaji melalui analisis kebutuhan, tracer study, umpan balik pengguna lulusan, evaluasi pemangku kepentingan, dan refleksi kelembagaan. Dalam konteks pendidikan Islam, relevansi juga mencakup kemampuan kurikulum untuk menghubungkan standar akademik dengan nilai keislaman, budaya lembaga, pembentukan karakter, dan keterampilan abad ke-21 [11], [18], [19]. Oleh sebab itu, kurikulum yang relevan bukan hanya kurikulum yang memenuhi tuntutan formal, melainkan kurikulum yang mampu menjaga keterhubungan antara tujuan pendidikan, kebutuhan nyata peserta didik, dan perubahan sosial yang terus berlangsung.

Selain relevansi, koherensi menjadi prinsip penting karena mutu kurikulum sangat ditentukan oleh keselarasan antara visi lembaga, profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, strategi pembelajaran, asesmen, dan evaluasi. Literatur tentang penjaminan mutu dan budaya mutu menekankan bahwa keberadaan standar tidak secara otomatis menghasilkan mutu apabila tidak diikuti oleh sistem yang selaras, kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan [1], [2], [3]. Dalam konteks ini, penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum yang lengkap secara administratif belum tentu bermutu apabila antar komponennya tidak saling terhubung. Koherensi kurikulum memungkinkan lembaga pendidikan menghindari tumpang tindih materi, ketidaksesuaian asesmen, fragmentasi pembelajaran, dan lemahnya pengukuran capaian kompetensi. Dengan demikian, koherensi menjadi dasar akuntabilitas akademik karena kurikulum yang terencana secara selaras dapat menunjukkan hubungan logis antara tujuan yang dirumuskan, proses pembelajaran yang dilaksanakan, dan hasil belajar yang diharapkan.

Prinsip partisipasi dan fleksibilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum bermutu tidak dapat dilakukan secara tertutup oleh elite kelembagaan, tetapi membutuhkan pelibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap proses dan hasil pendidikan. Literatur tentang manajemen kurikulum dan peningkatan mutu lulusan menegaskan bahwa keterlibatan guru, dosen, peserta didik, alumni, pengguna lulusan, masyarakat, dan unit penjaminan mutu dapat memperkuat akuntabilitas serta penerimaan kurikulum [7], [8], [13]. Namun, partisipasi saja tidak cukup apabila kurikulum tidak memiliki ruang adaptasi terhadap perubahan sosial, teknologi, kebijakan, dan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, fleksibilitas menjadi prinsip yang melengkapi partisipasi. Kurikulum yang fleksibel memungkinkan lembaga mengembangkan pembelajaran diferensiatif, proyek kontekstual, integrasi teknologi, pilihan topik, dan inovasi pedagogis tanpa kehilangan arah mutu. Fleksibilitas dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai pelonggaran standar, tetapi

sebagai kemampuan kurikulum untuk tetap relevan dalam situasi pendidikan yang berubah cepat.

Dalam kaitannya dengan transformasi digital, penelitian ini menegaskan bahwa teknologi perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem kurikulum, bukan hanya sebagai media pembelajaran tambahan. Literatur tentang inovasi digital dan modernisasi layanan pendidikan menunjukkan bahwa teknologi dapat mendukung peningkatan mutu apabila terintegrasi dengan tata kelola kelembagaan, profesionalisme pendidik, sistem monitoring, dan evaluasi pembelajaran [17], [21]. Berdasarkan temuan penelitian ini, digitalisasi kurikulum dapat memperkuat fleksibilitas dan evaluasi berkelanjutan melalui dokumentasi capaian pembelajaran, pengelolaan data peserta didik, umpan balik berbasis platform, serta pemantauan keterlaksanaan kurikulum. Namun, integrasi teknologi tetap memerlukan desain pedagogis yang jelas agar tidak berhenti pada penggunaan perangkat digital semata. Dengan demikian, kurikulum berbasis mutu harus mampu menghubungkan inovasi digital dengan capaian pembelajaran, asesmen, karakter peserta didik, dan kebutuhan kontekstual lembaga pendidikan.

Prinsip integrasi yang ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pendidikan bermutu tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan keterampilan, sikap, nilai, literasi, kreativitas, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial. Dalam pendidikan Islam, gagasan integrasi telah banyak dibahas melalui penyatuan ilmu pengetahuan, nilai keislaman, budaya pesantren, karakter, dan keterampilan abad ke-21 [11], [18], [19]. Penelitian ini memperluas gagasan tersebut dengan menempatkan integrasi sebagai prinsip umum dalam perencanaan kurikulum berbasis mutu. Artinya, integrasi tidak hanya penting bagi lembaga pendidikan Islam, tetapi juga relevan bagi semua satuan pendidikan yang ingin menghindari fragmentasi antara teori dan praktik, antara pengetahuan dan nilai, serta antara pembelajaran akademik dan kebutuhan kehidupan nyata. Kurikulum yang integratif memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih utuh karena setiap komponen pembelajaran diarahkan untuk membentuk kompetensi secara holistik.

Evaluasi berkelanjutan menjadi prinsip yang mengikat seluruh proses perencanaan kurikulum karena mutu pendidikan tidak dapat dijaga tanpa mekanisme peninjauan dan perbaikan berbasis data. Literatur tentang penjaminan mutu menegaskan pentingnya monitoring, evaluasi, audit akademik, akreditasi, dan tindak lanjut sebagai bagian dari siklus peningkatan mutu [12], [13], [14]. Penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan menempatkan evaluasi bukan hanya sebagai tahap akhir setelah implementasi, tetapi sebagai komponen yang harus dirancang sejak awal perencanaan kurikulum. Evaluasi kurikulum perlu mencakup ketercapaian capaian pembelajaran, kesesuaian asesmen, efektivitas strategi pembelajaran, kesiapan pendidik, kepuasan peserta didik, relevansi lulusan, dan keberlanjutan tindak lanjut. Dengan demikian, evaluasi berkelanjutan menjadikan kurikulum sebagai sistem hidup yang terus diperbaiki, bukan dokumen formal yang berhenti setelah disahkan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis tujuh prinsip perencanaan kurikulum sebagai kerangka peningkatan mutu pendidikan, yaitu relevansi, koherensi, partisipasi, fleksibilitas, integrasi, orientasi capaian pembelajaran, dan evaluasi berkelanjutan. Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung membahas desain kurikulum, implementasi kurikulum, manajemen kurikulum, penjaminan mutu, atau inovasi pembelajaran secara

terpisah, penelitian ini menyatukan berbagai dimensi tersebut ke dalam satu kerangka konseptual yang lebih operasional. Kerangka ini menegaskan bahwa mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, kebijakan akreditasi, atau hasil belajar, tetapi juga oleh kualitas keputusan kurikuler yang dibuat sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan pentingnya kurikulum bagi mutu pendidikan, tetapi juga menjelaskan prinsip-prinsip yang perlu dioperasionalkan agar kurikulum benar-benar menjadi instrumen pengarah, pengendali, dan penggerak peningkatan mutu.

Implikasi teoretis penelitian ini adalah perlunya memperkuat kajian manajemen pendidikan dengan menempatkan perencanaan kurikulum sebagai bagian integral dari sistem penjaminan mutu. Mutu pendidikan tidak cukup dianalisis dari aspek kepemimpinan, fasilitas, akreditasi, atau capaian hasil belajar, tetapi juga perlu dilihat dari kualitas desain kurikulum yang mengarahkan seluruh proses pendidikan. Secara praktis, sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi perlu menjadikan perencanaan kurikulum sebagai proses kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi capaian pembelajaran. Lembaga pendidikan perlu melakukan analisis kebutuhan secara berkala, melibatkan pemangku kepentingan, menyusun peta kurikulum, memastikan keselarasan antara capaian pembelajaran dan asesmen, memperkuat kompetensi pendidik, mengintegrasikan teknologi secara proporsional, serta melakukan evaluasi kurikulum secara berkelanjutan. Secara kebijakan, hasil penelitian ini mengisyaratkan pentingnya pengembangan mekanisme audit kurikulum yang tidak hanya menilai kelengkapan dokumen, tetapi juga menilai relevansi, koherensi, keterlaksanaan, dampak pembelajaran, kepuasan pemangku kepentingan, dan tindak lanjut perbaikan.

Meskipun menawarkan kontribusi konseptual, penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur integratif sehingga temuan yang dihasilkan masih bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris pada satuan pendidikan tertentu. Kedua, literatur yang dianalisis dibatasi pada artikel terbit tahun 2018–2025 yang memiliki DOI dan relevan dengan perencanaan kurikulum serta mutu pendidikan, sehingga kemungkinan masih terdapat sumber penting lain, seperti buku akademik, dokumen kebijakan, laporan institusional, atau penelitian lokal tanpa DOI yang belum terakomodasi. Ketiga, penelitian ini belum membedakan secara mendalam karakteristik perencanaan kurikulum pada berbagai jenis lembaga pendidikan, seperti sekolah umum, madrasah, pesantren, pendidikan vokasi, dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji kerangka tujuh prinsip perencanaan kurikulum ini melalui studi kasus, survei, Delphi study, atau mixed-method research pada konteks lembaga pendidikan yang berbeda agar kontribusinya terhadap mutu pendidikan dapat divalidasi secara empiris.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan kurikulum merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan karena kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai dokumen akademik, tetapi juga sebagai sistem pengarah, pengendali, dan pengembang kualitas pembelajaran. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum yang bermutu perlu dibangun atas tujuh prinsip utama, yaitu relevansi, koherensi, partisipasi, fleksibilitas, integrasi, orientasi capaian pembelajaran, dan evaluasi berkelanjutan. Relevansi memastikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, dan identitas kelembagaan; koherensi menjamin keselarasan

antara visi, profil lulusan, capaian pembelajaran, materi, strategi pembelajaran, dan asesmen; partisipasi memperkuat akuntabilitas serta penerimaan kurikulum; fleksibilitas memungkinkan kurikulum beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan kebijakan; integrasi menyatukan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan pengalaman belajar; orientasi capaian pembelajaran menjadikan kurikulum lebih terukur dan dapat dievaluasi; sedangkan evaluasi berkelanjutan memastikan adanya perbaikan mutu secara sistematis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan sintesis konseptual tujuh prinsip perencanaan kurikulum sebagai kerangka peningkatan mutu pendidikan, sedangkan secara praktis penelitian ini menegaskan perlunya lembaga pendidikan menjadikan perencanaan kurikulum sebagai proses kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Dengan demikian, sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi perlu memperkuat mekanisme analisis kebutuhan, pelibatan pemangku kepentingan, pemetaan kurikulum, pengembangan asesmen, evaluasi periodik, dan tindak lanjut perbaikan agar kurikulum benar-benar menjadi fondasi peningkatan mutu pendidikan yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan.

## INFORMASI PENULIS

### *Penulis Koresponden*

**Ice Rosina Sari** – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);  
Email: [ghazzalrosinov@gmail.com](mailto:ghazzalrosinov@gmail.com)

### *Penulis*

**Ice Rosina Sari** – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);  
Email: [ghazzalrosinov@gmail.com](mailto:ghazzalrosinov@gmail.com)

**Agus Pahrudin** – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);  
[orcid.org/0000-0002-2421-4463](https://orcid.org/0000-0002-2421-4463)

Email: [agus.pahrudin@radenintan.ac.id](mailto:agus.pahrudin@radenintan.ac.id)

**Sri Rahmi** – Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh (Indonesia);  
Email: [sriahmi@ar-raniry.ac.id](mailto:sriahmi@ar-raniry.ac.id)

## KONFLIK KEPENTINGAN

"Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan."

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. Alzafari and J. Ursin, "Implementation of quality assurance standards in European higher education: does context matter?," *Qual. High. Educ.*, vol. 25, no. 1, pp. 58–75, Jan. 2019. <https://doi.org/10.1080/13538322.2019.1578069>
- [2] R. I. Asiyai, "Best practices for quality assurance in higher education: Implications for educational administration," *Int. J. Leadersh. Educ.*, vol. 25, no. 5, pp. 752–768, 2022. <https://doi.org/10.1080/13603124.2019.1710569>
- [3] C. Hildesheim and K. Sonntag, "The Quality Culture Inventory: a comprehensive approach towards measuring quality culture in higher education," *Stud. High. Educ.*, vol. 45, no. 4, pp. 892–908, Apr. 2020. <https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1672639>

- [4] A. F. Lubis, “Manajemen Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di Perguruan Tinggi Islam,” *Al-Tanzim J. Manaj. Pendidik. Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 28–40, Sep. 2020. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2.1248>
- [5] M. Rojii, I. Istikomah, C. N. Aulina, and I. Fauji, “Desain kurikulum sekolah Islam terpadu: Studi kasus di SMPIT Insan Kamil Sidoarjo,” *Al-Tanzim J. Manaj. Pendidik. Islam*, vol. 3, no. 2, pp. 49–60, Oct. 2019. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v3i2.667>
- [6] R. Nuraeni and I. Irawan, “Implementation of scientific integration concept monitoring and evaluation on the pesantren learning curriculum,” *Al-Tanzim J. Manaj. Pendidik. Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 86–95, 2021. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i2.2186>
- [7] S. Syarifah and N. F. Buerahen, “Curriculum management in improving the quality of graduates in Thai Pesantren,” *Nidhomul Haq J. Manaj. Pendidik. Islam*, vol. 8, no. 3, pp. 370–385, Nov. 2023. <https://doi.org/10.31538/ndh.v8i3.4132>
- [8] R. P. Tuala, I. Iqbal, and M. K. Fadillah, “Towards the professionalism excellence of teachers: Curriculum management transformation,” *Al-Tanzim J. Manaj. Pendidik. Islam*, vol. 8, no. 3, pp. 916–928, Sep. 2024. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i3.8187>
- [9] A. Syarifudin, “Realizing total quality management through strategic management implementation in school,” *Al-Tanzim J. Manaj. Pendidik. Islam*, vol. 7, no. 4, pp. 1177–1190, Nov. 2023. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v7i4.6787>
- [10] N. Aliyah, A. M. Thabrani, S. Rodliyah, B. K. Amal, and S. L. Samosir, “Research-based Islamic education curriculum management,” *Al-Hayat J. Islam. Educ.*, vol. 8, no. 3, pp. 1158–1172, Nov. 2024. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i3.668>
- [11] N. Zakiya, I. Irsyad, R. Rusdinal, and N. Nellitawati, “Schools based on Kulliyatul Mu’allimin Al Islamiyyah,” *Nidhomul Haq J. Manaj. Pendidik. Islam*, vol. 8, no. 3, 2023. <https://doi.org/10.31538/ndh.v8i3.4310>
- [12] M. Fadhli, “Sistem penjaminan mutu internal dan eksternal pada lembaga pendidikan tinggi,” *Al-Tanzim J. Manaj. Pendidik. Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 171–183, 2020. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2>
- [13] T. M. Tarigan and F. Zahara, “Internal quality assurance system in achieving accreditation scores for Islamic religious higher education,” *Al-Hayat J. Islam. Educ.*, vol. 8, no. 2, p. 677, Jul. 2024. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i2.638>
- [14] D. Wulandari, I. L. Amirudin, A. S. Kamila, and M. R. M. A. Fathir, “Quality assurance challenges in Indonesian Islamic higher education,” *Edudeena J. Islam. Relig. Educ.*, vol. 9, no. 2, pp. 192–206, 2025. <https://doi.org/10.30762/edudeena.v9i2.7097>
- [15] J. Holst, “Towards coherence on sustainability in education: A systematic review of Whole Institution Approaches,” *Sustain. Sci.*, vol. 18, no. 2, pp. 1015–1030, Mar. 2023. <https://doi.org/10.1007/s11625-022-01226-8>
- [16] F. A. Yusuf, “Total Quality Management (TQM) and quality of higher education: A meta-analysis study,” *Int. J. Instr.*, vol. 16, no. 2, pp. 161–178, 2023. <https://doi.org/10.29333/iji.2023.16210a>
- [17] R. Rada, I. K. Dewi, A. Mashar, and R. Alamsyah, “Beyond the classroom: Total Quality Management and digital innovation in education,” *Al-Tanzim J. Manaj. Pendidik. Islam*, vol. 8, no. 4, pp. 1276–1288, Dec. 2024. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i4.9608>
- [18] A. Fahrudin and M. K. Malik, “A pesantren cultural value-based learning model: Integrating Islamic values and 21st-century skills,” *Cendekia J. Kependidikan dan Kemasyarakatan*, vol. 23, no. 1, pp. 89–105, Jun. 2025. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v23i1.10646>
- [19] H. Muzakki, M. Arif, and M. Mamah, “Integration of Islamic education values and Fiqh al-Bi’ah in cultivating environmentally responsible character,” *Cendekia J. Kependidikan dan Kemasyarakatan*, vol. 23, no. 1, pp. 55–70, Jun. 2025.

- <https://doi.org/10.21154/cendekia.v23i1.10272>
- [20] F. Ismail, A. B. Santoso, M. Umar, and A. K. Halim, "Enhancing excellence: Analyzing quality management in Islamic boarding schools," *Al-Tanzim J. Manaj. Pendidik. Islam*, vol. 7, no. 3, pp. 848–862, Jul. 2023. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v7i3.4522>
- [21] M. Huda, "Modernization of Islamic boarding school education: Utilization of the Pintro application system to enhance quality management of Islamic boarding school services," *Cendekia J. Kependidikan dan Kemasyarakatan*, vol. 23, no. 1, pp. 142–158, Jun. 2025. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v23i1.10511>
- [22] M. M. Rahman and S. Nasrin, "Perceived service quality at higher education institutions: A study on the success factors of total quality management practices in Bangladesh," *Soc. Sci. Humanit. Open*, vol. 10, p. 100997, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100997>
- [23] S. Mtisi, "The qualitative case study research strategy as applied on a rural enterprise development doctoral research project," *Int. J. Qual. Methods*, vol. 21, Apr. 2022. <https://doi.org/10.1177/16094069221145849>
- [24] H. Snyder, "Literature review as a research methodology: An overview and guidelines," *J. Bus. Res.*, vol. 104, pp. 333–339, Nov. 2019. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- [25] J. W. Creswell and J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications, 2022. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=Pr2VEAAAQBAJ>
- [26] J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE, 2018.
- [27] M. J. Page *et al.*, "The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews," *BMJ*, p. n71, Mar. 2021. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- [28] J. Paul and A. R. Criado, "The art of writing literature review: What do we know and what do we need to know?," *Int. Bus. Rev.*, vol. 29, no. 4, p. 101717, Aug. 2020. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101717>